

Analisis Kebijakan Publik

Ade Epa, Andin Apriyani, Julian Maryam, Sophie Nur Izatuhaq Azahra, Zanzabila Azizah Muthmainah, Dian Herdiana

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Evaade877@gmail.com, apriyaneandin@gmail.com, julianmaryam2025@gmail.com, nursopi249@gmail.com

zanzabilaazizah@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Public policy analysis is an important process that helps decision-makers formulate and select the right policies to address various problems faced by society and government. This process is not just about making decisions spontaneously or based on intuition, but is carried out systematically, scientifically and objectively by collecting data, evaluating various alternatives, and predicting the impact that may arise from each policy choice.

One of the main benefits of public policy analysis is that it helps clarify and identify the actual problem. Often, the problems faced by governments or public organizations are not simple and involve many interrelated aspects. With in-depth analysis, policymakers can understand the root of the problem more comprehensively, so that the solutions taken are not only temporary or partial, but are able to solve the problem as a whole.

Keyword: *public policy analysis*

ABSTRAK

Analisis kebijakan publik merupakan proses penting yang membantu para pembuat keputusan dalam merumuskan dan memilih kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Proses ini tidak hanya sekadar membuat keputusan secara spontan atau berdasarkan intuisi, melainkan dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan objektif dengan mengumpulkan data, mengevaluasi berbagai alternatif, serta memprediksi dampak yang mungkin timbul dari setiap pilihan kebijakan.

Salah satu manfaat utama dari analisis kebijakan publik adalah membantu memperjelas dan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi. Seringkali, masalah yang dihadapi pemerintah atau organisasi publik tidak sederhana dan melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Dengan analisis yang mendalam, pembuat kebijakan dapat memahami akar permasalahan secara lebih komprehensif, sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara atau parsial, melainkan mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Kebijakan kerap menjadi topik yang menimbulkan perdebatan tanpa henti, baik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta, lembaga, organisasi profit, maupun non-profit. Masyarakat terus aktif memperbincangkan kebijakan, baik yang bersifat internal organisasi maupun yang berdampak eksternal. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis kebijakan publik, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar kebijakan. Hal ini penting mengingat istilah "kebijakan" memiliki cakupan dan penggunaan yang sangat luas, yang dapat memunculkan berbagai sudut pandang dalam memahaminya. (Nugroho, 2021)

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau "policy" berasal dari kata Yunani "polis" yang berarti negara atau kota, kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi "politia" yang juga berarti negara,

dan akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai “policie,” yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” umumnya merujuk pada tindakan dari seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah, dalam konteks kegiatan tertentu. Selanjutnya, kajian kebijakan dalam ranah akademis lebih bersifat sistematis dan ilmiah, dan mengarah pada analisis kebijakan publik. Adapun istilah “publik” sering kali disamakan dengan makna negara, sebagaimana dinyatakan oleh Islami (2007) dan Wahab (2008), yang tetap menggunakan istilah negara dalam menerjemahkan kata “publik.” (Solichin Abdul Wahab, 2016)

Analisis kebijakan publik merupakan proses penting yang membantu para pembuat keputusan dalam merumuskan dan memilih kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Proses ini tidak hanya sekadar membuat keputusan secara spontan atau berdasarkan intuisi, melainkan dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan objektif dengan mengumpulkan data, mengevaluasi berbagai alternatif, serta memprediksi dampak yang mungkin timbul dari setiap pilihan kebijakan.

Selain itu, analisis kebijakan publik juga memungkinkan pembuat keputusan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Setiap alternatif dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti efektivitas, efisiensi, kelayakan, dan dampak sosial ekonomi. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat membandingkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan dan memilih kebijakan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta kondisi sumber daya yang ada. (Dunn, 2003)

Analisis kebijakan juga membuka ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih inklusif dan demokratis. Masyarakat yang merasa didengar dan dilibatkan cenderung lebih mendukung dan mematuhi kebijakan yang dibuat, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan berhasil.

METODE

Penelitian ini Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari dari berbagai literatur agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara membaca, buku, jurnal dan media lainnya sebagai sumber acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis mengacu pada proses pemecahan dan pembahasan secara mendalam terhadap suatu isu, fenomena, data, atau informasi guna memahami elemen-elemen penyusunnya, mengidentifikasi pola atau hubungan yang ada, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Dalam konteks jurnal akademik, analisis bertujuan untuk menggali lebih dalam suatu topik atau hasil penelitian, memberikan wawasan yang lebih komprehensif, dan berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang yang dibahas.

Kebijakan publik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah public policy, dimana dalam Black Law Dictionary, kata public diartikan sebagai:

1. *Relating or belonging to an entire community, state, or nation;*
2. *Open or available for all to use, share, or enjoy; dan*
3. *(Of a company) having shares that are available on an open market.*

Sedangkan kata policy diartikan sebagai :

1. *The general principles by which a government is guided in its management of public affairs;*
2. *A document containing a contract of insurance; dan*
3. *A type of lottery in which bettors select numbers to bet on and place the bet with a policy writer.*

Dalam *Black's Law Dictionary*, kebijakan publik dijelaskan sebagai prinsip-prinsip dan norma-norma yang dipandang penting oleh lembaga legislatif maupun lembaga peradilan, yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Meski demikian, definisi tersebut masih belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan. Dalam praktiknya, pembuatan kebijakan di sebuah negara juga melibatkan kekuasaan eksekutif, yang bahkan lebih sering berperan dibandingkan lembaga legislatif atau yudikatif dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Oleh sebab itu, definisi yang dianggap lebih tepat untuk digunakan adalah bahwa istilah "*public*" merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan seluruh komunitas, negara bagian, atau negara secara keseluruhan. Sementara itu, "*policy*" dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatur urusan-urusan publik. Dengan demikian, kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan pedoman yang diterapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggung jawabnya, yang keberlakuannya mencakup seluruh warga negara.

Menurut Bidyut Chakrabarty dan Prakash Chand, pengertian kebijakan publik dapat dipahami dengan memisahkan makna dari kata "kebijakan" (*policy*) dan "publik" (*public*). Istilah "kebijakan" merujuk pada keseluruhan rencana atau program tindakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, kata "publik" mengacu pada sekelompok masyarakat luas yang memiliki kepentingan bersama, bukan hanya pada individu-individu dengan kepentingan pribadi. Sejalan dengan itu, Robert Vance Presthus menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh individu atau sekelompok orang, yang bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan, mengarahkan, atau merumuskan suatu langkah tindakan tertentu. (Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, 2022)

Menurut Dye (1992:2), kebijakan publik merujuk pada segala bentuk tindakan atau keputusan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang diabaikan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984:18), yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang dikatakan dan dilakukan, atau justru tidak dilakukan oleh pemerintah, yang mencerminkan tujuan dan arah dari program-program pemerintahan. Kartasmita (1997:142) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan cara untuk memahami dan menjelaskan: (1) tindakan atau ketidakaktifan pemerintah terhadap suatu persoalan, (2) faktor-faktor yang memengaruhi tindakan tersebut, dan (3) dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, Anderson dalam Islamy (1994:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dijalankan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Budi Winarno, analisis kebijakan publik adalah sebuah kegiatan intelektual yang bertujuan untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan publik yang dianggap paling efektif dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Ia menekankan bahwa analisis kebijakan publik bukan hanya merupakan kegiatan teknis, melainkan juga melibatkan proses politik, karena hasil analisis dapat dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan dari berbagai aktor kebijakan. (Budi Winarno, 2021)

Analisis kebijakan publik mencakup dua dimensi utama: deskriptif dan preskriptif. Dimensi deskriptif berfokus pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan, sementara dimensi preskriptif berfungsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah.

Menurut Agus Dwiyanto, analisis kebijakan publik merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah publik dan merumuskan berbagai pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dwiyanto menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan atau keputusan yang dirancang untuk mengatasi persoalan-persoalan publik. (Agus Dwiyanto, 2006)

Analisis kebijakan dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan rasional, yang meliputi langkah-langkah seperti identifikasi masalah, perumusan tujuan kebijakan, penentuan alternatif solusi, evaluasi terhadap alternatif-alternatif tersebut, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik di mana kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan.

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan. Seiring dengan bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat, kebutuhan akan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik pun semakin meningkat. (William N. Dunn, 2003)

B. Jenis-Jenis Analisis Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan publik, terdapat berbagai jenis analisis yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan publik secara komprehensif. kebijakan publik berdasarkan buku "Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktik" oleh M. T. F. Suryanto (2015):

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah jenis analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi yang ada dalam kebijakan publik. Pada tahap ini, analisis berfokus pada pengumpulan dan penyajian data yang ada tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi tertentu. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang melatarbelakangi munculnya kebijakan.

2. Analisis Normatif

Analisis normatif berfokus pada penilaian terhadap kebijakan publik berdasarkan norma-norma atau prinsip-prinsip yang dianggap benar atau ideal. Jenis analisis ini lebih menekankan pada evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan, etika, dan moral dalam masyarakat.

3. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif menggunakan metode yang lebih bersifat deskriptif dan naratif untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari kebijakan yang lebih mendalam. Pada jenis analisis ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, studi kasus, atau observasi untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan.

4. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif berfokus pada penggunaan data numerik untuk mengukur dan mengevaluasi kebijakan. Biasanya, metode ini melibatkan penggunaan teknik statistik dan model matematis untuk menghitung efektivitas dan dampak suatu kebijakan berdasarkan angka atau data terukur.

5. Analisis Dampak Sosial

Analisis dampak sosial bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan publik memengaruhi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Analisis ini memperhatikan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan sosial, ketidaksetaraan, dan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, atau minoritas.

6. Analisis Kebijakan Ekonomi

Analisis kebijakan ekonomi berfokus pada dampak kebijakan terhadap aspek ekonomi suatu negara atau daerah. Jenis analisis ini melihat kebijakan dari perspektif biaya dan manfaat, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan distribusi kekayaan.

7. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan kebijakan yang diterapkan di negara atau wilayah lain dengan kebijakan yang ada di negara kita. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan mana yang lebih efektif atau memiliki hasil yang lebih baik, serta untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.

8. Analisis Politik

Analisis politik berfokus pada dinamika kekuasaan, aktor-aktor politik, dan kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Jenis analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik, kelompok kepentingan, dan partai politik. (Suryanto, 2015)

Berikut adalah beberapa Klasifikasi antara lain :

1. Klasifikasi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

Menurut William N. Dunn analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan kapan analisis tersebut dilakukan, yaitu analisis prospektif dan analisis retrospektif. Analisis prospektif dilakukan sebelum kebijakan diterapkan, sedangkan analisis retrospektif dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan. (Dunn, 2003)

2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Analisis

Menurut Solichin Abdul Wahab analisis kebijakan dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu analisis untuk kebijakan (analysis for policy), analisis tentang kebijakan (analysis of policy), dan analisis dalam proses kebijakan (analysis in policy process). Analisis untuk kebijakan bertujuan memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan, analisis tentang kebijakan meneliti sebab-akibat dari kebijakan, dan analisis dalam proses kebijakan mengkaji tahapan serta mekanisme pembuatan kebijakan. (Wahab, 2008)

3. Klasifikasi Berdasarkan Metode Analisis

Menurut Riant Nugroho, berdasarkan metode yang dipakai, analisis kebijakan dapat dikategorikan menjadi analisis kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Analisis kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik, analisis kualitatif menggunakan data deskriptif serta interpretasi, sedangkan analisis campuran menggabungkan kedua pendekatan tersebut. (Riant Nugroho, 2014)

4. Klasifikasi Berdasarkan Tahapan Kebijakan

Menurut Subarsono, analisis kebijakan dapat dibedakan berdasarkan tahapan siklus kebijakan, yaitu analisis agenda setting, analisis formulasi, analisis implementasi, dan analisis evaluasi kebijakan. Agenda setting fokus pada proses penetapan prioritas kebijakan, formulasi membahas perumusan kebijakan, implementasi menelaah pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi menilai hasil serta dampaknya. (Subarsono, 2013)

5. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Analisis

Menurut Winarno, tujuan analisis kebijakan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan keadaan kebijakan saat ini, analisis prediktif berfungsi memproyeksikan kemungkinan dampak kebijakan, dan analisis preskriptif memberikan rekomendasi atau langkah yang harus diambil. (Winarno, 2012)

6. Klasifikasi Berdasarkan Fokus Kajian

Menurut Islamy, fokus kajian analisis kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu analisis isi kebijakan, proses kebijakan, dan dampak kebijakan. Analisis isi mempelajari substansi dan materi kebijakan, analisis proses menelaah dinamika dan tahapan pembuatan kebijakan, dan analisis dampak mengukur efek serta konsekuensi yang muncul dari kebijakan tersebut. (Islamy, 2009)

C. Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berkualitas. Dengan melakukan analisis secara mendalam, pembuat kebijakan dapat memahami berbagai aspek dari masalah yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan intuisi atau kepentingan tertentu, tetapi berdasarkan data dan fakta yang jelas. Bahwassnya hal ini membuat kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, analisis kebijakan publik juga berfungsi untuk menghindarkan pembuatan kebijakan yang bersifat hanya menguntungkan kelompok tertentu atau individu saja. Dengan pendekatan yang ilmiah dan objektif, analisis ini membantu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang akan diambil. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat menjadi lebih rasional dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Manfaat selanjutnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan sebab-akibat dari suatu kebijakan. Dengan mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi, pembuat kebijakan dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih matang dan meminimalisir resiko dari sebuah kegagalan. Selain itu, analisis kebijakan juga memungkinkan kebijakan yang dihasilkan dapat diukur keberhasilannya dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Analisis kebijakan publik juga membantu dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan panduan yang jelas dari hasil analisis, pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Setelah kebijakan dijalankan, analisis juga berperan dalam menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu dilakukan perbaikan.

Tidak kalah penting, analisis kebijakan publik membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut, aspirasi dan kebutuhan mereka dapat didengar dan dipertimbangkan. Hal ini membuat kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan publik berfungsi sebagai alat yang sangat berguna bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Dengan menggunakan analisis yang tepat, kebijakan yang dibuat tidak hanya lebih efektif dan efisien, tetapi juga lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat dan solusi yang nyata bagi masyarakat. (Dunn, 2003)

Lebih jauh lagi, analisis kebijakan publik tidak hanya berfokus pada tahap perumusan, tetapi juga memberikan pedoman yang menyeluruh dalam pelaksanaan serta evaluasi kebijakan. Proses analisis ini mencakup identifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama implementasi, serta penyesuaian strategi agar kebijakan tetap relevan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang terjadi. Dengan adanya panduan yang komprehensif ini, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan mampu beradaptasi terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan adanya perbaikan atau penyesuaian kebijakan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. (Subarsono, 2005)

Kismartini menyoroti peran krusial analisis kebijakan publik yang tidak hanya terbatas pada tahap perumusan kebijakan semata, melainkan juga mencakup aspek implementasi dan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, analisis kebijakan harus mampu memberikan panduan yang komprehensif agar setiap tahap dalam siklus kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan terintegrasi. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala dan sistematis. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan refleksi yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kekurangan, hambatan, atau perubahan kondisi yang terjadi setelah kebijakan diterapkan. Dengan adanya evaluasi yang rutin, kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan agar tetap relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Hal ini sangat penting agar kebijakan tidak menjadi usang atau tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proses evaluasi yang berkelanjutan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi publik secara luas. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses yang dinamis dan

adaptif, yang harus selalu responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.(Kismartini, 2004)

D. Contoh-Contoh Kasus Analisis Kebijakan Publik

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sebelum tahun 2014, layanan jaminan kesehatan di Indonesia hanya mencakup kelompok tertentu dan belum merata. Pemerintah kemudian menginisiasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan seluruh penduduk, termasuk mereka yang kurang mampu, memperoleh akses kesehatan yang layak dan setara. Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dan mulai dijalankan pada 1 Januari 2014, sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Melalui JKN, masyarakat diwajibkan menjadi peserta dan membayar iuran rutin sesuai kelas layanan, sedangkan kelompok miskin dibiayai oleh pemerintah. Program ini bertujuan menyediakan layanan kesehatan menyeluruh tanpa diskriminasi.

Namun, kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, seperti defisit anggaran akibat ketidakseimbangan antara iuran dan beban layanan, serta kualitas layanan yang belum merata. Meski demikian, JKN menjadi langkah strategis dalam reformasi sistem kesehatan nasional.(Dunn, 2003)

2. Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kota Bandung

Di Kota Bandung, volume sampah plastik kantong plastik sekali pakai menjadi masalah lingkungan yang serius. Untuk menekan dampaknya, pemerintah kota menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 37 Tahun 2019. Kebijakan ini mewajibkan konsumen membayar tambahan jika ingin menggunakan kantong plastik saat berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko modern.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke tas belanja yang dapat digunakan berulang kali dan ramah lingkungan. Kendati menimbulkan protes dari sebagian masyarakat dan tantangan pengawasan di lapangan, kebijakan ini terbukti mulai mengurangi penggunaan plastik dalam jangka pendek.(Subarsono, 2011)

KESIMPULAN

Analisis kebijakan publik adalah proses memahami dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan isu, fenomena, atau data tertentu. Analisis membantu mengidentifikasi hubungan antara informasi dan implikasinya. Dalam penelitian akademis, analisis digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang tersebut. Kebijakan publik didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur pengelolaan urusan publik. Hal ini sering digunakan oleh badan legislatif dan badan yudikatif untuk menentukan efektivitas kebijakan publik.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola urusan publik. Kebijakan publik juga disebut sebagai dokumen kebijakan yang berisi kontrak asuransi. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh individu atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu. Analisis kebijakan publik adalah kegiatan teknis yang membantu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan publik yang tepat guna dan berdaya guna dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau bangsa.

Sebagai suatu proses sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah publik, merumuskan alternatif kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang paling efektif dan tepat. Proses ini tidak hanya melibatkan pendekatan teknis, tetapi juga aspek politik, karena hasil analisis dapat dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan berbagai aktor kebijakan. Analisis kebijakan publik mencakup dua dimensi utama: deskriptif, yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirancang dan diterapkan, dan preskriptif, yang memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik tempat kebijakan tersebut diterapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Diucapkan terimakasih kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Ridwan Eko Prasetyo S.H.I, M.H .dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Lutfi Fahrul Rizal,S.Sy.,M.H. dan Dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik , Program Studi Hukum Tata Negara , UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada Semester Ganjil Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan jurnal ini. Tanpa bimbingan dan motivasi dari Bapak, penulisan jurnal ini tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat menjadi bekal berharga bagi kami dalam mengembangkan kemampuan akademik dan profesional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2006). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Budi Winarno. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Kismartini. (2004). *Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan Publik*. vol.1 no 3.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Riant Nugroho. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka belajar.
- Solichin Abdul Wahab. (2016). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *engantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka belajar.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka belajar.
- Subarsono, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kebijakan Publik*. Pustaka belajar.
- Suryanto, M. T. F. (2015). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Kencana.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Edisi Kedu). Bumi Aksara.
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedu).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.